

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi masalah besar dalam sejarah negara Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan, kesulitan dalam membayar kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya layanan publik, kurangnya pekerjaan, kurangnya jaminan dan perlindungan sosial keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota dan yang lebih parah, kemiskinan juga menyebabkan jutaan rakyat terbatas dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan (Budiningsih, 2019).

Pattinama (2009) mengemukakan bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak sisi (multi faset). Kemiskinan memiliki dimensi yang bersifat kompleks, oleh sebab itu para ahli mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis kemiskinan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan kehidupan. Berikut ini merupakan presentase penduduk miskin yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1
Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Maret Tahun 2019-2022

Tahun	Bulan	Jumlah Penduduk Miskin
2019	Maret	25,14 Jiwa
2020	Maret	26,42 Jiwa
2021	Maret	27,54 Jiwa
2022	Maret	26,16 Jiwa

Sumber data: Badan Pusat Statistika (data diolah) (www.bps.go.id)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebelum pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2019 sebanyak 25,14 juta jiwa dengan persentase 9,41%. Jumlah penduduk miskin semakin menurun

dibandingkan pada bulan Maret 2021 sebesar 27,54 juta jiwa dengan persentase 10,14%. Sedangkan Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 Juta jiwa dengan persentase 9,78% dan Pada Maret 2022 Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun mencapai 26,16 juta jiwa dan menurun sebanyak 1,38 juta jiwa.

Semua ukuran kemiskinan dapat dipertimbangkan berdasarkan norma tertentu, norma tersebut sangat penting dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Penyebab kemiskinan adalah keterbatasan sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan dan pengetahuan. Penyebab kemiskinan juga berasal dari kebijakan pembangunan atau kebijakan dari pemerintah yang kurang memperhatikan wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau, serta adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa dan kota (Irza, 2021).

Pada Maret 2020 tercatat tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 7,38% (11,16 juta orang), adapun di pedesaan tercatat hampir dua kali lipat yaitu sebesar 12,82% (15,26 juta orang) Angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan data di tahun 2019, di mana untuk wilayah perkotaan sebesar 6,56% dan pedesaan sebesar 12,60% (Zaini, 2021).

Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.185.704 ribu jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk tentu saja berpengaruh pada jumlah orang miskin di Kabupaten Cirebon. Berikut ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2019	26,80 Jiwa
2020	26,42 Jiwa
2021	27,40 Jiwa
2022	24,78 Jiwa

Sumber data: Badan Pusat Statistika (data diolah) (www.bps.go.id)

Dari tabel 1.2 menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon yaitu masih cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2019-2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 mencapai 9,94% atau sebanyak 26,80 Juta Jiwa. Pada Tahun 2020 tingkat kemiskinan mencapai 9,78% atau sebanyak 26,42 juta jiwa. Pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan mencapai 10,10% atau sebanyak 27,40 juta jiwa. Pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan mencapai 9,22% atau sebanyak 24,78 juta jiwa.

Dalam usaha menanggulangi kemiskinan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan berbagai macam hal dengan dibuatnya suatu kebijakan dan program dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang ada. Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah memiliki strategi penanggulangan kemiskinan dengan dibuatnya beberapa program. Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki 10 program penanggulangan kemiskinan diantaranya: (1) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), (2) Beasiswa bagi siswa/i (KIP), (3) pembayaran iuran BPJS (PBI), (4) Jamkesmas melalui KIS, (5) bantuan alat tangkap nelayan, (6) Pelatihan koperasi dan usaha kecil, (7) beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu, (8) pelatihan wirausaha kepada keluarga tidak mampu, (9) bantuan mesin dan kapal nelayan, (10) sembako murah (Diana Wahyuniati, 2019).

Sama halnya dengan Desa Banjarwangunan. Desa Banjarwangunan memiliki angka kemiskinan dan memiliki berbagai macam potensi yang digunakan untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni tanah yang luas dan adanya UKM. Potensi yang telah disebutkan ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dapat diketahui bahwa jumlah kemiskinan di Desa Banjarwangunan sebesar 1.883 jiwa.

Pemerintah pusat memiliki program untuk menanggulangi kemiskinan. Berikut ini ada dua strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan orang miskin dengan memenuhi kebutuhan berbagai sektor. Kedua, memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat mengambil tindakan pencegahan kemiskinan baru (Debrina, 2018).

Selain itu pemerintah juga memiliki program untuk menanggulangi kemiskinan berupa BPNT, PKH, dan BLT. Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk yang menerima program bantuan.

Tabel 1.3

Jumlah Penerima Program Bantuan di Desa Banjarwangunan

Tahun	Jumlah Penerima Bantuan
2020	405 Jiwa
2021	234 Jiwa
2022	159 Jiwa

Sumber data: Desa Banjarwangunan

Dari tabel 1.4 menunjukkan bahwa Jumlah penerima program bantuan di Desa Banjarwangunan pada Tahun 2022 menurun sebesar 159 Jiwa yang semula Tahun 2021 sebesar 234 Jiwa. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2020 sebesar 405 jiwa. Jumlah penduduk miskin yang di Desa Banjarwangunan secara langsung dipengaruhi oleh keberadaan rumah tangga miskin. Walaupun jumlah kemiskinan di Desa Banjarwangunan sudah berkurang, tetapi kenyataannya masih banyak kemiskinan yang dijumpai. Rupanya solusi yang ampuh dalam menanggulangi kemiskinan belum ditemukan.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Desa Banjarwangunan pada saat ini tengah mengupayakan menurunkan jumlah penduduk miskin dari berbagai dimensi. Untuk menjangkau hal tersebut diperlukan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banjarwangunan. Terkait perlunya strategi yang nantinya akan dijelaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah desa setempat serta untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan, maka perlu dilakukan analisis sesuai dengan situasi secara strategis. Dalam hal ini perlu digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT dalam metode perencanaan strategi ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), ancaman (Threats) dalam suatu project atau suatu program pembangunan.

Menurut Muchtar (2015), analisa pada SWOT merupakan salah satu instrumen yang beraneka ragam, yang digunakan berkali-kali diberbagai tahap proyek. Instrumen ini dapat diterapkan secara luas atau sub komponen yang kecil (bagian dari strategi) dapat dipisahkan agar dapat melakukan analisis yang lengkap atau detail. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pembangunan Desa Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang menurunkan angka kemiskinan dengan membangun desa melalui program-program yang ada di Desa seperti BLT, PKH, BPNT dan lain sebagainya. Penelitian ini tergolong kedalam wilayah kajian Ekonomi Pembangunan dengan topik kajian Ekonomi Perdesaan dan Ekonomi Pesisir.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deksriptif dengan menggunakan analisis data.

3. Jenis Masalah

- a) Belum adanya kesesuaian antara anggaran peningkatan operasional dan penggunaannya untuk meningkatkan pembangunan desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- b) Belum maksimalnya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan untuk pembangunan desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- c) Kurang koordinasi dari lintas sektor, terutama bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kesehatan, sosial ekonomi,

pendidikan, pemukiman dan lingkungan serta bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang ada dalam keterangan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dengan itu peneliti perlu membatasi masalah penelitiannya pada Strategi Pembangunan Desa dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada Kemiskinan, Data, Program dan Strategi penanggulangan kemiskinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana gambaran desa banjarwangunan?
2. Bagaimana gambaran kemiskinan desa banjarwangunan?
3. Bagaimana gambaran pembangunan desa banjarwangunan?
4. Bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan?

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran desa Banjarwangunan.
2. Mengetahui gambaran kemiskinan desa Banjarwangunan.
3. Mengetahui gambaran pembangunan desa Banjarwangunan.
4. Mengetahui strategi penanggulangan kemiskinan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka peneliti dapat memaparkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - b. Dapat dijadikan bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis dapat memahami dan menambah pengetahuan mengenai gambaran dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menangani strategi pembangunan desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah desa tentang bagaimana upaya pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi serta penelitian ini juga dapat diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan agar lebih baik kedepannya.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam hal ini khususnya bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan-bantuan berupa Program Anggaran dari pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan acuan bahwa Program bantuan tidak dapat menanggulangi kemiskinan yang ada di Masyarakat karena bersifat sementara.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi perbandingan dan acuan. Hal ini menghindari anggapan adanya plagiarism. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang penulis dapatkan:

1. Budiningsih, (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Melung melalui pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa mampu mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Melung, karena menyerap tenaga kerja, mengadakan pelatihan yang berdampak pada masyarakat produktif, dan membuat unit wisata, yang bisa menyokong pendapatan asli desa. Dibuktikan dengan perubahan status Desa Melung dari sebelum adanya dana desa adalah desa tertinggal, kemudian setelah adanya dana desa menjadi desa berkembang dan optimis untuk menjadi desa yang mandiri (Budiningsih, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat persamaan membahas tentang bagaimana strategi pembangunan desa dan peranan pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan terhadap desa dan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah pada strategi yang digunakan oleh pemerintah desa dan fokus penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat tersebut mampu mengangkat kemiskinan pada desa tersebut.
2. Wahyuniati & Abbas, (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Batam”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat belum mampu mengurangi kemiskinan. Sebab, program tersebut hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian saran bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga yang menangani masalah kemiskinan, agar membuat program-program yang mendorong produktivitas masyarakat miskin agar dapat keluar dari kemiskinan (Wahyuniati & Abbas, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat

persamaan membahas tentang penanggulangan kemiskinan desa dengan sumber penelitian melalui wawancara. Sedangkan perbedaannya adalah lebih fokus membahas program-program penanggulangan kemiskinan dibandingkan dengan pemberdayaan pemerintah terhadap masyarakat miskin.

3. Sari et al., (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa program yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan meliputi 5 hal antara lain, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin (Sari et al., 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat persamaan membahas tentang strategi pembangunan desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada instrumen wawancara dan metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode triangulasi data dengan melibatkan instrumen wawancara SWOT.
4. Abidin et al., (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pertanian Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus Di Kecamatan Pemijahan dan Leuwiliang)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 9 strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan pertanian di Kabupaten Bogor, yang merupakan alternatif strategi yang dapat dijalankan ke depan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor harus difokuskan kepada tiga strategi yaitu: 1) Peningkatan kualitas SDM petani; 2) Pengembangan komoditas unggulan

padi sawah, ubi jalar, jeruk siam dan manggis, dan 3) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian (Abidin et al., 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang penanggulangan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya adalah lebih fokus kepada pembedayaan masyarakat guna mengangkat kemiskinan di desa.

5. Nindatu, (2019) dalam jurnalnya dengan judul “Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berbagai kegiatan pemberdayaan telah memberdayakan masyarakat miskin dan membentuk kemandirian sehingga masyarakat dapat menolong dirinya sendiri serta memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Strategi pemberdayaan yang digunakan berbasis partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pencapaian hasil. Selain itu, berbasis entrepreneurship dan penguatan potensi sumber daya alam lokal. Pemberdayaan juga melibatkan perempuan dan stakeholder dalam masyarakat yaitu pemerintah daerah, perguruan tinggi, pemerintah desa dan pihak swasta (Nindatu, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan, Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berupa lokasi penelitian dan pemberdayaan masyarakat.
6. Arsjad et al., (2022) dalam artikelnya yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyada”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyada memiliki peran yang baik dalam penanggulangan kemiskinan di desa, akan tetapi belum sepenuhnya maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan di desa. Sedangkan yang menjadi faktor penyebab kemiskinan yaitu 1) Keterbatasan

sarana dan prasarana, 2) Kurangnya sumber daya alam, 3) Minimnya kualitas sumber daya manusia, 4) Kelembagaan organisasi yang belum maksimal. Rekomendasi penelitian ini yaitu dimana pemerintah Desa Bantulia Jaya sebagai pelaku utama dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam penanggulangan kemiskinan di desa, seharusnya lebih memaksimalkan potensi yang ada, serta mengajak semua pihak yang terkait untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di desa (Arsjad et al., 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan, Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berupa lokasi penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

7. Pratama & Mudarya, (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Sanggalangit dipengaruhi empat variable implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dampak pelaksanaan PKH dalam sumber upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sanggalangit berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan, dan dampak negative yakni dampak yang tidak diharapkan. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan PKH di Desa Sanggalangit, dimana evaluasi tersebut menyangkut isi kebijakan yakni PKH berhasil mengurangi angka dan memutus serta merubah perilaku KSM. Evaluasi pelaksanaan kebijakan yakni lebih ditekankan pada periode pencairan bantuan dan kekurangan personil pendamping PKH. Evaluasi terhadap dampak kebijakan lebih ditekankan pada bagaimana meningkatkan dampak positifnya dan mengurangi bahkan sebisanya menghilangkan dampak negatifnya (Pratama & Mudarya, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh

penulis bahwa Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan, Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berupa lokasi penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

8. Nambiar, E. S., (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Tamm Review: Re-imagining forestry and wood business: pathways to rural development, poverty alleviation and climate change mitigation in the tropics” dalam bahasa Indonesia “Strategi Pembangunan Perdesaan Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Iklim di Daerah Tropis”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya menerapkan strategi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai usaha skala kecil, namun penelitian dan penerapannya sangat kurang untuk melayani kebutuhan utama ini. Hambatan lain yang dihadapi oleh petani kecil antara lain, kurangnya transparansi dan hak hukum atas kepemilikan tanah di beberapa negara, lapisan peraturan birokrasi dan sistem sertifikasi hutan internasional yang tidak praktis saat ini yang berada di luar jangkauan petani kecil (Nambiar Ek Sadanandan, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan, Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berupa lokasi penelitian dan pemberdayaan masyarakat.
9. Ayuniyyah, et al., (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “The Impact Of Zakat In Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction From The Perspective Of Gander In West Java Indonesian” dalam bahasa Indonesia “Dampak Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Pendapatan dari Perspektif Gender di Jawa Barat Indonesia”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran

zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan berdasarkan jenis kelamin penerima zakat (Ayuniyyah, Qurroh, 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan, Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berupa lokasi penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

10. Alawiyah, T., & Setiawan, F., (2021) dalam penelitiannya dengan judul “Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Desa”. Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut: kondisi wilayah, pertumbuhan ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, ketimpangan, rasa ketergantungan, dan kenyamanan dalam zona. Pengentasan kemiskinan melalui kearifan lokal dapat dilakukan dengan menggali sumber daya alam dan potensi diri yang ada pada masyarakat pedesaan. Kemudian pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam proses penanggulangan kemiskinan membutuhkan empat prinsip yaitu: kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan (Alawiyah & Setiawan, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan, Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berupa lokasi penelitian dan pemberdayaan masyarakat.
11. Kustanto & Sholihah, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Reserve Brain Drain Sebagai Alternatif Mengatasi Kemiskinan”. Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang urbanisasi yang terjadi di Jawa Timur menyedot sumber daya manusia yang berkualitas di desa. Hal ini terlihat dari meningkatnya urbanisasi intelektual dan migran usia produktif di Jawa

Timur dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Upaya mengatasi ketimpangan kemiskinan antara desa dan kota sulit terwujud manakala desa semakin kurang sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan. Reserve brain menjadi sebuah solusi bagi upaya mengembalikan sumber daya manusia desa sebagai salah satu modal untuk melakukan pembangunan (Kustanto & Sholihah, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan, Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berupa lokasi penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

12. Papilaya, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan pada kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Papilaya, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan, Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berupa lokasi penelitian dan pemberdayaan masyarakat.
13. Lurie Marciatie et al., (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Pada Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Katingan”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas fisik lahan ditinjau dari faktor pendukung

pertumbuhan tanaman dan faktor pembatas, serta tingkat akses pemanfaatan yang legal, dapat dilakukan untuk pengembangan komoditas beras di daerah ini. Berdasarkan analisis scenario untuk meningkatkan nilai tambah produk beras dan model permasalahannya, produk beras dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani jika dioptimalkan dapat menjadi pilihan dalam memerangi kemiskinan di daerah. Strategi dan arah kebijakan yang direkomendasikan dapat menjadi stimulus bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan produktivitas padi di wilayah perdesaan Katingan (Lurie Marciatie et al., 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan, Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berupa lokasi penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

14. Hendy Setiawan, (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Penyuluhan Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Masyarakat di Desa Simpar Kabupaten Batang”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Simpar memiliki sikap partisipatif dalam kegiatan penyuluhan tersebut, di mana diskusi dan tanya jawab dapat berjalan dengan baik. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini seluruh komponen Desa Simpar mengerti dan mengeksekusi bagaimana cara untuk menyelesaikan kemiskinan yang mereka hadapi dengan kekuatan-kekuatan masyarakat itu sendiri dengan berdasar pada pemahaman paca penyuluhan tersebut (Hendy Setiawan, 2023). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan, Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemiskinan. Sedangkan

perbedaan dari penelitian ini berupa lokasi penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

15. Kogoya, (2023) dalam penelitiannya dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah daerah pendidikan bagi anak-anak yang ada di distrik nunggawi, membiayai biaya studi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Seperti dibebaskannya biaya sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) serta dibebaskan biaya-biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). lalu Program perbaikan rumah layak diuni. Karena saat ini warga masih pake rumah honai di distrik nunggawi (Kogoya, 2023). Berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang penanggulangan kemiskinan, Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berupa lokasi penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

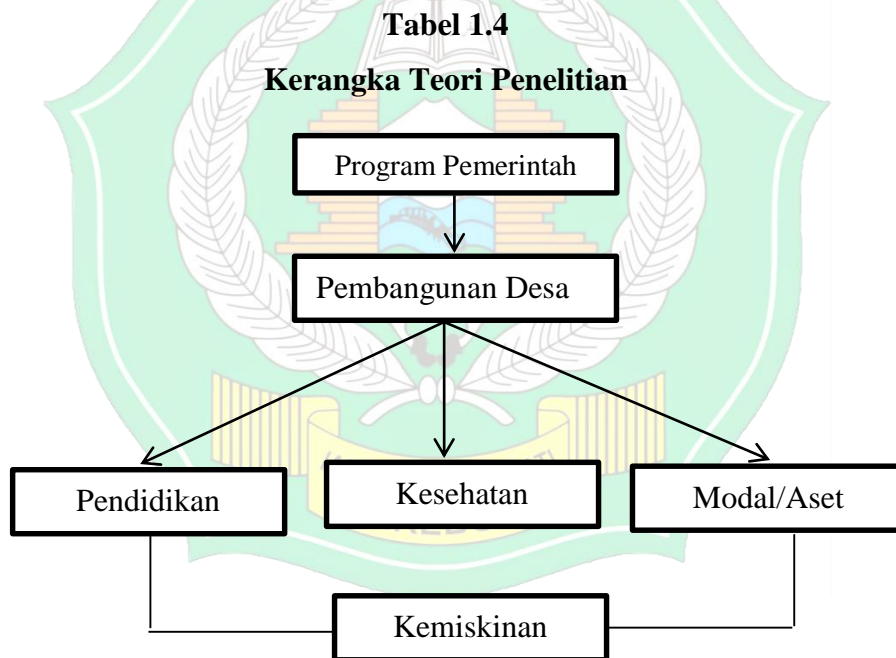
H. Kerangka Pemikiran

Program pembangunan desa dirancang oleh Pemerintah untuk memecahkan tiga permasalahan utama yaitu pengangguran, ketimpangan dan pengentasan kemiskinan. Ada tiga karakteristik penduduk miskin. Ketiga karakteristik penduduk miskin tersebut adalah : (1) Tingkat pendidikan rendah, (2) Tingkat kesehatan dan fasilitas kesehatan rendah, (3) Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset dengan kekuatan sendiri. Untuk memecahkan masalah ini, perlu kebijakan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, berikut karakteristiknya terlebih dahulu.

Program bantuan untuk pembangunan desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Banjarwangunan sebanyak 159 KPM untuk keluarga tidak

mampu. Istilah keluarga sangat miskin dalam Undang-undang Penanganan Fakir Miskin menggunakan istilah Keluarga Pra Sejahtera yang disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat yang sudah terdata kedalam Basis Data Terpadu Kementrian Sosial Republik Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial masyarakat. Masalah sosial adalah pertentangan antar unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.

Perubahan struktur ekonomi, bertumbuh atau pesatnya pertumbuhan produksi di sektor industri dan jasa berdampak lebih besar terhadap pendapatan nasional. Sedangkan perubahan sosial dipandang sebagai distribusi kekayaan yang adil dalam akses ke sumber daya sosial ekonomi seperti pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, air bersih, dan kepemilikan.



Sumber: Penelitian, 2023

Dari kerangka berfikir ini dapat diketahui bahwa Program Pemerintah Desa Banjarwangunan digunakan untuk Pembangunan Desa Banjarwangunan sebagai input dari penelitian, yang nantinya akan diproses apakah Pembangunan Desa nya itu berupa membangun ranah pendidikan, kesehatan, dan modal aset. Sehingga output yang dihasilkan oleh peneliti yaitu dapat

mengetahui bagaimana pembangunan desa apakah dari ketiga indikator tersebut dapat menanggulangi kemiskinan di Desa Banjarwangunan.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang kemiskinan, konsep desa, teori pembangunan, pembangunan desa, strategi penanggulangan kemiskinan, dan analisis SWOT.

III KONDISI OBJEKTIF

Pada bab ini diuraikan tentang metodologi penelitian, diantaranya lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, mengombinasikan hasil penelitian komponen SWOT, instrumen penelitian, objek penelitian, teknik analisis data, pengabsahan data, deskripsi data dan informan penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Gambaran umum objek penelitian diantaranya gambaran umum desa banjarwangunan, gambaran kemiskinan desa banjarwangunan, gambaran pembangunan desa banjarwangunan dan strategi penanggulangan kemiskinan.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan terkait ringkasan hasil penelitian yang sudah diteliti. Dan berisi saran untuk peneliti yang ingin meneruskan permasalahan dalam penelitian yang ditelini ini.